

## **BAB II**

### **DINAMIKA HUBUNGAN LUAR NEGERI INGGRIS DAN IRAN SEBELUM TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK PADA TAHUN 2011**

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang dinamika hubungan kedua negara, sejarah, dan putusnya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2011.

#### **A. Selayang Pandang Hubungan Inggris dan Iran**

Hubungan Inggris-Iran yang secara alamiah ‘bermusuhan’ disebabkan oleh trauma panjang masyarakat Iran terhadap kolonialisme Inggris di Timur Tengah dan India. Walaupun pada faktanya Iran tidak pernah secara langsung dijajah oleh Inggris, nyatanya negara ini seringkali berada dibawah pengaruh atau lebih tepatnya dominasi Inggris dan Rusia (Abedin, 2018).

Inggris sejak dulu memang sudah melirik Iran, daya tariknya tidak lain adalah lokasi strategis (berada diantara rute darat menuju India). Pada abad ke 19, Inggris berinvestasi jor-joran di Iran, banyak dari perusahaan-perusahaan Inggris membeli hak-hak eksklusif untuk mendirikan bank, mencetak mata uang, mengeksploitasi mineral, menjalankan bisnis transportasi, dan lainnya (Kinzer, 2011).

Pada tahun 1913, pemerintah Inggris melakukan manuver untuk membeli semua minyak Iran. Selain itu, 6 tahun kemudian Inggris mendapat hak atas tentara dan perbendaharaan Iran melalui *Anglo-Persian Agreement 1919*. Upaya-upaya Inggris mendominasi Iran dari segala lini mendapat respon negatif dari masyarakat. Saat Perang Dunia II, Inggris menduduki Iran, menjadikannya rute transit pasukan Uni Soviet dan sekaligus menguras sumber daya minyak wilayah tersebut.

Selama menduduki Iran, Inggris merasa Shah Reza Pahlavi tidak dapat diandalkan hingga akhirnya Inggris merancang kudeta untuk menjatuhkannya dan terpilihlah Shah baru, yaitu anaknya Mohammad Reza Pahlavi (Kinzer, 2011).

Sikap manipulatif Inggris kepada Iran meninggalkan warisan psikologis abadi yang membuat masyarakat Iran tidak mempercayai Inggris. Sebagai contoh, penarikan diri Inggris dari Timur Tengah pada tahun 1971 telah menyebabkan masalah politik, hukum dan teritorial bagi Iran juga tetangganya. Banyak dari pejabat-pejabat Iran dipengaruhi oleh Inggris ketika membuat kebijakan, hal ini menyebabkan beberapa batas wilayah di Iran dengan negara tetangga justru tidak ditentukan oleh orang Iran, melainkan oleh Inggris (Abedin, 2018).

Inggris tentu saja harus menanggung konsekuensi dari apa yang telah ia tanam. Pasalnya pergantian rezim melalui Revolusi Iran, melahirkan Ayatollah Khomeini, pemimpin negara yang taat pada ajaran agama dan berpusat pada Islam. Iran yang bernuansa Islam berhasil menarik simpatian dari penduduk muslim Inggris. Hasilnya, pemerintah Inggris diserang balik oleh masyarakatnya sendiri pada tahun 1989 gara-gara Salman Rushdie, buronan utama Iran, dijamin keselamatannya oleh pemerintah Inggris setelah menulis buku *The Satanic Verse* yang kontroversial karena menistakan ajaran Islam. Massa yang mayoritas muslim Inggris tersebut menyatakan dukungannya kepada Iran untuk mengesekusi Rushdie dan memprotes keras pemerintah Inggris (Abedin, 2018).

Kebencian Iran terhadap Inggris bisa dibilang sudah tidak terbendung. Jika ada satu negara di bumi yang bersedia menyanyikan "*Death to England*" pasti Iran-lah pelakunya. Kenyataan inilah yang membuat pejabat-pejabat dan pemimpin Iran menutup mata ketika masyarakatnya menyerang Kedutaan Besar Inggris di Teheran.

Beberapa dari mereka mengatakan apa yang terjadi di Kedutaan Besar Inggris di Teheran belum ada apa-apanya jika dibandingkan ‘siksaan’ dari generasi ke generasi yang



*Gambar 2.1 Pengunjuk Rasa Membakar Bendera Inggris di depan Kedutaan Besar Inggris di Teheran, Iran*

*Sumber: <https://www.nytimes.com/2011/12/04/opinion/sunday/irans-first-great-satan-was-england.html>*

dilakukan Inggris (Kinzer, 2011).

Padahal aksi penyerangan ke Kedutaan Besar dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun merupakan pelanggaran hukum internasional yang sangat mencolok. Bahkan Presiden Mahmoud Ahmadinejad di duga berada dibalik peristiwa penyerangan itu. Alasan pengunjuk rasa menyerang Kedutaan Besar Inggris disebabkan oleh ‘percikan’ sanksi ekonomi yang dijatuhkan Inggris kepada Iran. Uniknya, negara-negara lain yang menjatuhkan sanksi sama dan bahkan lebih berat seperti Amerika Serikat, justru kedutaannya aman-aman saja tanpa ada satu orangpun protes apalagi menyerang kedutaan (Kinzer, 2011). Orang-orang Iran jelas memperlakukan Inggris secara khusus dalam peristiwa ini.

## **B. Sejarah Hubungan Luar Negeri Inggris dan Iran**

### **1. Masa sebelum Perang Dunia II**

#### **a. Politik Luar Negeri Inggris dengan Iran pada era Kerajaan Safawi**

Sejarah menjadi saksi hubungan kedua negara selama berabad-abad memang selalu naik turun. Baik Inggris maupun Iran punya *track-record* permusuhan yang cukup panjang. Terutama dari sudut pandang Iran, meskipun begitu bukan berarti tidak ada saat-saat dimana kedua negara berada dalam situasi yang kooperatif. Pada tahun 1553, Raja Edward VI dari Inggris mengutus seorang petualang sekaligus pedagang kaya raya, Sebastian Cabot untuk mengembangkan perusahaan dagang semi-profit yang bekerjasama dengan *Grand Duke Ivan IV* dari Rusia di Kota Moskow. Perusahaan hasil kerjasama tersebut diberi nama Moskow Trading Company (MTC). Sebelah selatan dari MTC merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Persia<sup>1</sup>, yaitu Kerajaan Safawi (Guildhall Library, 2007).

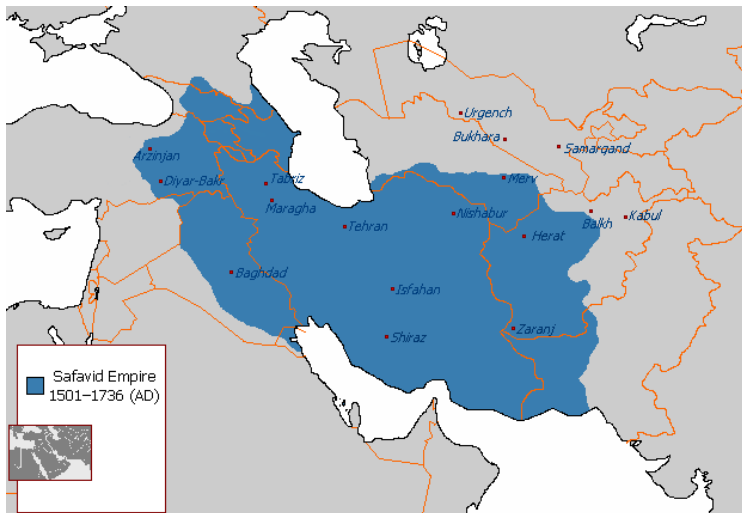
Pada masa pemerintahan Shah Tahmasp I (Kerajaan Safawi), MTC mulai mengirim utusan-utusan diplomatiknya untuk mengekspansi bisnis mereka. Upaya negosiasi berlangsung cukup lama, terhitung ada sekitar 6 utusan yang dikirimkan. Pasalnya, selama masa tersebut kekaisaran Safawi sibuk berperang melawan rival mereka, kekaisaran Turki Ottoman. Akhirnya pada tahun 1579, MTC berhasil menembus pasar wilayah yang dikuasai bangsa Persia tersebut sehingga terjalinlah kejasama kedua kerajaan. Masih di tahun yang sama, Abbas I dari Kerajaan Safawi membentuk aliansi perlawanan terhadap Turki Ottoman. Inggris yang sadar akan ancaman Turki Ottoman, mengirimkan dua bersaudara; Robert Shirley, Anthony Shirley, dan sekelompok pasukan militer

---

<sup>1</sup> Persia saat ini lebih dikenal sebagai Iran

yang berjumlah 26 orang Inggris ke Qazvin. Inggris dengan senang hati membantu bangsa Persia, dan bangsa Persia dengan lapang dada menerima bantuan tersebut demi mengalahkan Turki Ottoman (Hamzabayova, 2014).

Tidak lama, Shirley bersaudara ditunjuk oleh Shah Abbas I untuk memimpin dan memodernisasi kavaleri kerajaan terutama para budak elit Ghulam<sup>2</sup>. Dampak dari modernisasi ini membuat Kerajaan Safawi menjadi kekuatan yang mengerikan. Pada perang pertama Ottoman-Safawi (1603-



Gambar 2.2 Kerajaan Safawi di bawah Shah Abbas I (Abbas the Great)

Sumber: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/The\\_maximum\\_extent\\_of\\_the\\_Safavid\\_Empire\\_under\\_Shah\\_Abbas\\_I.png](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/The_maximum_extent_of_the_Safavid_Empire_under_Shah_Abbas_I.png)

1618), mereka berhasil mengalahkan Turki Ottoman.

Beberapa peristiwa setelah itu menandai semakin eratnya hubungan Inggris dengan bangsa Persia (yang kelak akan menjadi Iran); *British East India Company* masuk ke wilayah

<sup>2</sup> Budak-budak yang terdiri dari orang-orang Sirkasia, Georgia, Armenia, dan ras Kaukasia lainnya.

Persia, pembentukan rute perdagangan untuk kain sutra melalui Jask di Selat Hormuz pada tahun 1616, dan menguatnya pengaruh orang-orang seperti Sir John Malcolm di Dinasti Qajarid (Hamzabayova, 2014).

### **b. Politik Luar Negeri Inggris dengan Iran pada era Dinasti Qajarid**

Kerjasama Inggris dan bangsa Persia mencapai ‘puncaknya’ pada masa Kerajaan Inggris dan Kerajaan Safawi. Setelah kekuatan Kerajaan Safawi melemah, Dinasti Qajarid kemudian mengambil alih peran sebagai pusat Kerajaan Persia. Sementara itu, kekuatan kolonial; Inggris, Portugis, dan Belanda berlomba-lomba memantapkan kaki mereka di tanah Persia melalui persaingan di wilayah Selatan dan Tenggara Persia di Teluk Persia. Selain kekuatan kolonial, Dinasti Qajarid semakin tidak berdaya dengan Rusia yang begitu kuat mendominasi wilayah Utara Persia.

Politik internal yang tidak stabil, dan ketidakmampuan pemerintah dalam mempertahankan kekuasaannya membuat Dinasti Qajarid tidak mampu membendung serangan politik asing yang menggerogotinya. Selama masa Shah Fath-Ali, elit-elit Inggris; Sir John Malcom, Sir Harford Jones-Brydges, Allen Lindsay, Henry Pottinger, Charles Christie, Sir John McNeill, Edmund Ironside, dan banyak lainnya, bahkan berikut serta dalam perpolitikan Persia. Contohnya, Allen Lindsay diangkat sebagai Jenderal pasukan Abbas Mirza. Pengaruh kekuatan asing, khususnya Inggris semakin menancap kuat di tanah Persia (Goldsmid, 1876).

Pada tahun 1813, Shah Fath-Ali dipaksa menandatangani *The Treaty of Gulistan* dan *The Treaty of Turkmenchay* akibat lemahnya pengadilan kerajaan yang bangkrut. Kedua perjanjian tersebut merupakan penanda perdamaian atau dengan kata lain ‘kesimpulan’ dari perebutan wilayah antara Rusia dan Persia. Kekalahan pasukan Abbas Mirza di Utara Persia menandai perpindahan kekuasaan dari Persia ke Rusia

terhadap wilayah yang di masa sekarang kita kenal sebagai wilayah Republik Azerbaijan dan Armenia Utara (Goldsmid,



*Gambar 2.3 Peta Persia Pasca The Treaty of Gulistan*

*Sumber: [http://www.iranreview.org/file/cms/files/greater\\_iran.gif](http://www.iranreview.org/file/cms/files/greater_iran.gif)*

1876).

Melemahnya kerajaan Qajarid Persia juga menandai peristiwa Perang Inggris-Persia (1856-1857). Inggris menentang upaya Persia menghalangi klaim mereka atas kota Herat yang saat itu merupakan bagian dari Dinasti Qajarid. Puncaknya, Inggris berhasil memukul mundur Dinasti Qajarid yang dipimpin Shah Naser al-Din pada tahun 1857, kekalahan yang berujung pada terusirnya bangsa Persia dari Herat. Faktanya, perbatasan Selatan dan Timur Iran pada masa sekarang justru merupakan warisan dari Inggris. Setelah Perang Inggris-Persia, Frederic John Goldsmid diutus oleh pemerintah Inggris untuk menentukan garis perbatasan antara Persia dan India (Goldsmid, 1876).

Kemenangan ternyata tidak membuat Inggris berhenti. Pada tahun 1872, Shah Mozaffar ad-Din menandatangani

perjanjian dengan Baron Julius de Reuter<sup>3</sup>, seorang pengusaha Inggris yang merupakan pelopor telegrafi sekaligus *founder* dan CEO Reuters News Agency. Perjanjian mereka disebut George Nathaniel Curzon (Curzon, 1966, hal. 480): "*The most complete and extraordinary surrender of the entire industrial resources of a kingdom into foreign hands that has ever been dreamed of.*"

Menurut Curzon, perjanjian ini tidak masuk akal, sebuah perusahaan memegang kendali industri kerajaan. Banyak pihak terutama masyarakat Persia kemudian mengecam keputusan Shah Mozaffar ad-Din dan Reuter. Akibatnya, perjanjian tadi terpaksa dibatalkan. Sama halnya dengan Fatwa Tembakau yang diputuskan oleh Ayatollah Mirza Hassan Shirazi, masyarakat Persia marah besar terhadap Inggris. Belum lagi konsensi mengenai Kereta Api Persia yang dikontrak selama 70 tahun untuk dioperasikan oleh pengusaha Inggris (Curzon, 1966).

Di akhir abad ke-19, kota-kota di Selatan Persia dan Khuzestan serta Bushehr telah menjadi basis dominasi Inggris. Teheran yang merupakan pusat pemerintahan tampak tidak berdaya jika dibandingkan pengaruh Anglo-Rusia<sup>4</sup>. Menteri-menteri Persia tidak bisa dipilih secara langsung oleh Raja ataupun masyarakat Persia, melainkan harus melalui persetujuan Konsulat Anglo-Rusia. Praktik kolonialisme Inggris melalui pakta Anglo-Rusia memperdalam luka dan kebencian masyarakat Iran terhadap Inggris. Pengacara berkebangsaan Amerika yang menjadi menteri di Teheran, William Morgan Shuster harus mundur dari jabatannya akibat tekanan Konsulat Anglo-Rusia, ia kemudian menyampaikan kritik kerasnya terhadap Inggris dan Rusia melalui bukunya *The Strangling of Persia* (Shuster, 1912).

---

<sup>3</sup> Alias Paul Reuter

<sup>4</sup> Anglo-Rusia merupakan Pakta antara Inggris dan Rusia yang membagi daerah kolonial mereka di Persia, Afghanistan, dan Tibet



## 2. Masa Perang Dunia II dan Sesudahnya

### a. Politik Luar Negeri Inggris dengan Iran pada era Dinasti Pahlavi

Dinasti Qajarid yang sudah sangat lemah, tidak mampu menghadapi protes masyarakat yang menginginkan revolusi konstitusi. Kemerdekaan politik dan ekonomi Qajarid telah direnggut oleh Inggris juga Rusia. Pemerintah tidak berketuk ketika menghadapi Konvensi Anglo-Rusia (1907) dan Perjanjian 1919. Hasilnya, pada tahun 1925, Reza Khan, seorang mantan Brigadir Jenderal Persia memimpin operasi penggulingan pemerintahan Qajarid yang saat itu dipimpin Ahmad Shah Qajar. Momentum tersebut dimanfaatkan Reza Khan dengan mendeklarasikan dirinya sebagai Shah dari dinasti baru Kerajaan Persia, yaitu Dinasti Pahlavi. Dari dinasti inilah, terlahir Iran modern yang sekarang kita kenal (Utomo, 2018).

Teheran kembali menjadi pusat pemerintahan Dinasti Persia yang baru. Shah Reza Khan banyak mengadopsi nilai-nilai Barat. Di tengah-tengah masa pemerintahannya, ia mulai menerapkan pola pemerintahan sekuler. Banyak pihak merasa tidak puas dengan arah yang diambil oleh Shah Reza Khan, terutama ulama-ulama. Selama berabad-abad bangsa Persia selalu berada dibawah pemerintahan religius muslim.

Setelah membangun dan memperkuat pemerintah pusat. Shah Reza Khan dengan cepat mengakhiri otonomi Syeikh Khazal yang di dukung Inggris di Selatan Persia. Pada tahun 1935, Shah Reza Khan mengeluarkan dekrit yang meminta pihak asing untuk kemudian menggunakan istilah Iran<sup>5</sup> sebagai nama baru dari Kerajaan Persia. Dekrit yang

---

<sup>5</sup> Masyarakat memprotes keras nama Iran hingga pada tahun 1959, Mohammad Reza Pahlavi (penerus Reza Khan) mengumumkan bahwa istilah Persia dan Iran dapat digunakan secara bergantian (Administrator, 2017).

dikeluarkan oleh Shah Reza Khan pada tahun 1935 silam ternyata tidak disambut baik oleh masyarakat. Ulama-ulama lebih sepakat dengan penyebutan Persia dari pada Iran. Nama Iran sendiri diusulkan oleh Duta Besar Iran untuk Jerman. Selama Perang Dunia II berlangsung, hubungan Iran dan Jerman Nazi terbilang cukup baik, khususnya dalam hal perdagangan. Hubungan baik kedua negara memicu ketakutan Inggris akan kemungkinan Shah Reza Khan bergabung dengan Hitler. Walaupun terbilang sukses mengurangi pengaruh asing di tanah Persia, Shah Reza Khan harus kehilangan kedudukannya setelah diinvasi oleh Pakta Anglo-Soviet<sup>6</sup> pada tahun 1941 (Perang Dunia II).

Mohammed Mossadegh dipilih menjadi Perdana Menteri Iran pada tahun 1953 menggantikan Ali Razamara. Diangkatnya Mossadegh menjadi Perdana Menteri menyebabkan ketegangan antara pihak Iran dan Inggris. Pasalnya, Mosaddegh mencoba menasionalisasi Perusahaan Minyak Anglo-Iran milik Inggris (Lyons, 2015).

Dalam buku *All the Shah's Men*, diceritakan Inggris berusaha meyakinkan Harry S. Truman, Presiden Amerika Serikat untuk bergabung melawan Iran. Meskipun begitu, justru ketika Dwight Eisenhower menjabatlah Amerika Serikat baru bersedia membantu Inggris melawan Iran. Isu yang digunakan Inggris adalah komunisme yang mulai berkembang di Iran, dikhawatirkan apabila Mossadegh terus memimpin, Iran akan jatuh ke tangan komunisme. Inggris bersama CIA<sup>7</sup> lalu membuat rencana dengan sandi Operasi Ajax untuk menggulingkan Mosaddegh dari kursi Perdana Menteri. Peristiwa penggulingan tersebut kemudian lebih dikenal dengan nama *1953 Iranian coup d'état* (Kudeta Iran 1953). Kudeta dipimpin oleh Jenderal CIA, Kermit Roosevelt, Jr (Cucu dari Theodore Roosevelt). Pasca kudeta, banyak aktivis

---

<sup>6</sup> Pakta Anglo-Rusia pasca perubahan Rusia menjadi Uni Soviet

<sup>7</sup> Central Intelligence Agency, Badan Intelijen Pusat milik Amerika Serikat

politik Iran baik dari Partai Nasionalis maupun Komunis ditangkap dan dibunuh. Peristiwa mengerikan tadi memperdalam luka kekecewaan masyarakat Iran terhadap Inggris. Sudah menjadi rahasia umum dalam budaya Iran untuk tidak mempercayai Inggris (Lyons, 2015).

Dua tahun kemudian (1955) CENTO<sup>8</sup> (*Central Treaty Organisation*) dibentuk di bawah Pakta Baghdad oleh Inggris, Iran, Iraq, Pakistan, dan Turki untuk mengimbangi pengaruh Uni Soviet di regional. Sama seperti NATO, CENTO berfokus pada kerjasama antar negara tanpa adanya intervensi dalam urusan internal masing-masing negara anggotanya. Menjadikan Operasi Ajax sebagai tanda berakhirnya keterlibatan Inggris dalam perpolitikan Iran di era Dinasti Pahlavi. Setelah Perang Dunia II berakhir, Amerika Serikat bergerak cepat mengamankan politik Iran agar tidak jatuh ke tangan komunisme. Iran kemudian bertransformasi menjadi negara anti-komunis yang memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat (Lyons, 2015).

### **b. Politik Luar Negeri Inggris dengan Iran pada era Republik Islam Iran**

Pada tahun 1979, Revolusi Iran dikumandangkan. Revolusi ini mengejutkan seluruh dunia. Shah Mohammad Reza Pahlavi dinilai menjalankan pemerintahan brutal, korup, dan boros. Terlebih kebijakan Shah Reza melakukan westernisasi berbenturan dengan kultur muslim Syi'ah milik Iran. Melihat situasi konflik di Iran, Inggris lalu menutup kedutaan besar mereka di Teheran. Setahun kemudian, pada tanggal 30 April 1980, Kedutaan Besar Iran di London diambil alih oleh kelompok teroris yang beranggotakan enam orang selama enam hari. Inggris membekukan semua hubungan diplomatik dengan Iran. Hubungan kedua negara terputus

---

<sup>8</sup> CENTO bubar pada tahun 1979 karena sifatnya yang hanya simbolis (bentuk perlawanan terhadap Uni Soviet)

sampai akhirnya pada tahun 1988, Inggris membuka kembali kedutaan besar mereka di Teheran. (Lyons, 2015).

Setahun setelah hubungan diplomatik kedua negara membaik dengan dibukanya Kedutaan Besar Inggris di Teheran, Ayatollah Khomeini<sup>9</sup> mengeluarkan fatwa yang memerintahkan umat muslim untuk membunuh Salman Rushdie, seorang keturunan India-Inggris yang menulis buku *The Satanic Verses*. Buku tersebut mengkritik keras Islam dan dinilai menistakan ajaran Islam. Pemerintah Inggris menjamin perlindungan terhadap Rushdie, mengakibatkan Iran mengambil langkah serius dengan memutus hubungan diplomatiknya dengan Iran. Pada tahun 1992, tiga orang warga negara Iran, dan dua orang staf kedutaan Inggris ditangkap karena diduga berkomplot untuk membunuh Rushdie (Lyons, 2015).



Gambar 2.4 Sebuah Kartun Salman Rushdie di Surat Kabar Iran yang meminta pembaca memotong kepala penulis keturunan India-Inggris tersebut untuk memperingati 10 tahun fatwa Rushdie

Sumber: <https://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/iran-uk-relations-tehran-embassy-12-moments>

<sup>9</sup> Presiden Pertama Republik Islam Iran (Iran pasca revolusi)

Hubungan diplomatik kedua negara baru dilanjutkan kembali pada tahun 1990 dengan diwakili oleh *chargé d'affaires*<sup>10</sup>. Tahun 1991, menjadi awal dimbaiknya hubungan diplomatik antara Inggris-Iran dengan dibebaskannya Terry Waite yang disandera selama lima tahun oleh kelompok militan dukungan Iran di Lebanon (BBC, 2015). Masih di tahun yang sama, Presiden Iran saat itu, Hashemi Rafsanjani berusaha memperbaiki hubungan Iran dengan negara-negara Barat. Tapi tetap saja hubungan dengan Inggris tidak berlangsung dengan baik. Sebabnya adalah keputusan Rafsanjani yang tetap tidak ingin mencabut fatwa Khomeini terkait hukuman mati Salman Rushdie membuat negara-negara Eropa bersama dengan Inggris kemudian mengeluarkan resolusi sebagai reaksi terhadap fatwa Khomeini di Strasbourg, Prancis (Abdullah, 2016).

Diakhirinya fatwa Rushdie pada tahun 1998, menandai pemulihan hubungan diplomatik kedua negara di tingkat Duta Besar. Iran dan Inggris sepakat untuk saling mengirim Duta Besarnya ke masing-masing negara. Hubungan kedua negara semakin membaik dengan adanya kunjungan Menteri Luar Negeri Inggris, Jack Straw. Inggris melalui menternya menyatakan mendukung Iran melawan pedagang narkoba dari Afghanistan. Sayangnya, hubungan baik kedua negara tidak bertahan lama karena pada tahun 2002, Iran menolak David Reddaway sebagai Duta Besar Inggris untuk Teheran karena dianggap sebagai mata-mata. Keadaan tersebut diperparah dengan ditangkapnya delapan pelaut Inggris di Sungai Arvand dekat perbatasan Iran-Irak (Lyons, 2015).

Tahun 2004 menjadi puncak ketegangan kedua negara. Intervensi militer yang diinisiasi Amerika Serikat dengan bantuan Inggris dalam Perang Irak membuat Iran geram, apalagi pertempuran dilaksanakan di dekat kota-kota suci

---

<sup>10</sup> Kuasa Usaha, kondisi dimana level perwakilan negara berada dibawah Duta Besar dan hanya bersifat sementara atau berada pada basis temporer.

Syi'ah di Irak. Warga Iran yang tidak terima dengan keadaan tersebut berkumpul di depan Kedutaan besar Inggris di Teheran untuk menyatakan protes mereka. Masih di tahun yang sama, Inggris, Jerman, dan Prancis mengajukan resolusi yang mengkritik keras keputusan Iran yang enggan bekerjasama dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) atas program nuklir Iran (Lyons, 2015).

Respon Inggris terhadap program nuklir Iran semakin keras disuarakan melalui pemberitaan di media-media Barat. Situasi memanas lantaran banyak spekulasi mengenai kelanjutan program nuklir tersebut. Ada kemungkinan Presiden selanjutnya (pada masa itu) tidak akan melanjutkan lagi program pengembangan nuklir. Presiden yang terpilih, yaitu Mahmoud Ahmadinejad kemudian mengatakan bahwa program pengembangan nuklir Iran bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum internasional. Ia dengan tegas menyatakan Iran tetap melanjutkan program pengembangan nuklirnya meskipun negara-negara Barat dan Inggris terus menekan IAEA untuk menindaklanjuti penyelidikannya. Negara-negara Barat bahkan mengancam akan melakukan intervensi militer jika program tersebut terus dilanjutkan.

Inggris sangat yakin Iran sedang berusaha mengembangkan *Weapon Mass Destruction* (WMD). Berbagai cara diupayakan Inggris untuk mendesak Iran menghentikan program nuklirnya. Inggris beberapa kali mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah tegas, tapi desakan Inggris tidak berarti apa-apa karena Iran juga di dukung oleh Cina dan Rusia di Dewan Keamanan PBB.

Hubungan Inggris-Iran lalu diperparah dengan insiden penangkapan tentara Inggris di wilayah perairan Shatt Al-Arab yang berbatasan dengan Irak-Irak. Iran mengklaim bahwa kapal Inggris yang berisikan 15 awak kapal tersebut menyelundup masuk ke setengah kilometer wilayah yuridiksi Iran. Penangkapan ini terjadi menjelang pemungutan suara resolusi

1747 Dewan Kemanan PBB pada tanggal 24 Maret 2007 mengenai program nuklir Iran (Abdullah, 2016)

Pada tanggal 28 Agustus 2007, Ahmadinejad menegaskan Iran tidak akan menghentikan program nuklirnya dan terus mempertahankan laju yang sekarang. Dua bulan setelahnya, yaitu pada bulan Nopember 2007, Ahmadinejad mengeluarkan pernyataan bahwa Iran telah berhasil mencapai target 3,000 alat pengayaan uranium dalam pengembangan program nuklir Iran (Abdullah, 2016).

Bertahun-tahun kemudian, hubungan Inggris-Iran tidak juga membaik. Bahkan pada tahun 2009, ketika Mahmoud Ahmadinejad kembali terpilih sebagai Presiden Iran untuk yang kedua kalinya, terjadi kerusuhan yang diduga dimotori oleh Inggris.

### **C. Putusnya Hubungan Diplomatik Inggris dan Iran**

IAEA menerbitkan laporan hasil penyelidikan program nuklir Iran pada tahun 2011. Laporan tersebut menjadi dasar Inggris memberlakukan sanksi kepada Iran untuk memutus relasi khususnya dengan bank-bank Iran sekaligus menghentikan hubungan moneter kedua negara. Langkah Inggris ditanggapi Iran melalui keputusan Parlemen Iran pada tanggal 27 Nopember 2011 yang sepakat untuk mengusir Duta Besar Inggris di Teheran keluar dari tanah Persia tersebut. Dua hari kemudian, masyarakat Iran berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Inggris di Teheran.

Pemerintah Inggris menggambarkan peristiwa unjuk rasa tersebut dengan kalimat “tidak berperikemanusiaan dan keterlaluan”. Kantor digeledah, bom-bom dan batu dilemparkan, hingga gedung kedutaan yang dibakar. Demonstran yang sudah tidak terkendali masuk ke dalam gedung kedutaan, melakukan aksi vandalisme, menurunkan bendera Inggris lalu menggantinya dengan bendera Iran, merusak gambar Ratu Inggris, dan menyanyikan yel-yel yang

berisi kutukan terhadap Inggris. Perdana Menteri Inggris, David Cameron bahkan menyebut penyerangan Kedutaan Besar Inggris di Teheran telah melanggar Konvensi Wina



karena tidak memberikan perlindungan kepada diplomat juga perwakilan diplomatik yang seharusnya dijamin keamanannya dalam keadaan apapun (Abdullah, 2016).

Peristiwa penyerangan itu juga memicu kemarahan dunia internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton mengutuk penyerangan Kedutaan Besar Inggris dan menyebutnya ‘penghinaan’ terhadap masyarakat internasional. Bahkan Tiongkok yang tidak sepakat dengan penjatuhan sanksi kepada Iran menyayangkan tindakan pengunjuk rasa. Menurutnya, terlepas dari apapun permasalahannya, keselamatan dan kehormatan personil diplomatik harus tetap dijunjung tinggi.

Ketua Parlemen Iran Ali Larijani membela diri dengan berkomentar bahwa kemarahan masyarakat Iran disebabkan oleh perilaku Inggris sendiri yang selama bertahun-tahun berusaha menekan Iran (Alfajri, 2016). Pemerintah Inggris

*Gambar 2.5 Pengunjuk Rasa Menyerang Kedutaan Besar Inggris di Teheran*

*Sumber: [https://en.wikipedia.org/wiki/2011\\_attack\\_on\\_the\\_British\\_Embassy\\_in\\_Iran#/media/File:British\\_Embassy\\_Storming\\_03.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/2011_attack_on_the_British_Embassy_in_Iran#/media/File:British_Embassy_Storming_03.jpg)*



merespon tindakan barbar tersebut dengan memerintahkan diplomat Iran meninggalkan Inggris dalam waktu 48 jam yang menandai teputusnya hubungan diplomatik kedua negara (Lyons, 2015).